

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan di Pembahasan di atas dapat diuraikan bahwa pola interaksi eksekutif dan legislatif pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, mulai dari tahapan Perumusan KUA dan PPAS Serta Pembahasan RAPBD sampai pada tahapan pengesahan anggaran selalu diwarnai oleh beberapa fenomena interaksi antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan fungsi kewenangan saling menguasai, mendominasi. Maka untuk menganalisis pola relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pada pembahasan APBD Kabupatenn Buru Selatan Tahun 2015 ditemukan tiga pola interaksi eksekutif dan legislatif yaitu akomodasi, dominasi, dan kompromi namun di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan pembahasan kebijakan anggaran ditemukan adanya

proses pola yang lebih mendominasi. Pola interaksi eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan di tingkat Panitia Anggaran dan tingkat komisi yang membidangi beberapa SKPD cenderung lebih dominatif pihak DPRD.

2. Pola interaksi Eksekutif dan Legislatif pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 lebih di dominasi Pola Interaksi *Decesional* Yaitu Pola pertentangan yang berlangsung pada perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platfom Anggaran Sementara (PPAS) sehingga mengakibatkan keterlmabatan penetapan APBD, pola interakasi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (*barganing*) untuk melakukan pertukaran kepentingan legislatif kepada Eksekutif yang tidak diakomodir Pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) di masing-masing SKPD.
3. Pola relasi Eksekutif dan Legislatif Pada pembahasan KUA dan PPAS di pembahasan APBD Tahun 2015 lebih

di dominasi pola interaksi *Anticipated Reaction* yaitu Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menerima kepentingan DPRD yang mejadi rekomendasi Reses untuk menjaga kestabilan pembahasan APBD Tahun 2015.

4. Pada pembahasan RKA Kabupaten Buru Selatan terjadi pola relasi Eksekutif dan Legislatif yang lebih didominasi oleh interaksi *Non Decisional* yaitu pihak legislatif menolak melakukan pembahasan KUA dan PPAS karena dari pihak eksekutif tidak menyerahkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPD.
5. Pola interaksi eksekutif dan legislatif pada perumusan KUA dan PPAS ditemukan bahwa legitimasi pemerintah daerah sangat dominan dan interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada pembahasan akhir anggaran yang di bahasa oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Buru Selatan. Sedangkan dominasi DPRD dalam kaitan ini lebih pada saat penetapan anggaran di mana kewenangan

DPRD lebih kuat Karena mempunyai fungsi kewenangan pengawasan dan fungsi anggaran.

6. Pola relasi eksekutif dan legislatif pada proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) pada Rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 masih di dominasi oleh kepentingan politik sehingga berdampak pada berlarut-larutnya pembahasan anggaran sehingga mengakibatkan terlambatnya penetapan KUA, PPAS, serta APBD.
7. Pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (eksekutif) pada pembahasan KUA dan PPAS pada umumnya bersifat koersif di mana masing-masing SKPD memiliki kewenangan di fungsi penganggaran.Sementara, pola relasi perilaku ofensif lebih ditonjolkan ketika telah berdialog secara bersama dengan institusi DPRD (Legislatif) untuk membahas mulai pada penyusunan rancangan maupun perumusan APBD Kabupaten Buru Selatan.

8. Pola relasi Pemerintah Kabupaten (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) lebih dominan pada saat rapat pembahasan RAPBD pada masing-masing komisi yang membidangi beberapa SKPD terkait, maka posisi DPRD secara umum menunjukkan perilaku yang didominasi pembahasan anggaran. Pola relasi DPRD cenderung melakukan negosiasi, lobby kepentingan proyek pada Sub program yang terdapat pada tiap SKPD. Maka di setiap proses pembahasan anggaran yang melibatkan DPRD selalu diwarnai oleh negosiasi anggaran publik.
9. Pola Relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Tahun 2015 sangat berpengaruh pada *Personal Background, political Background* anggota DPRD dalam melakukan pengelolaan anggaran Kabupaten Buru Selatan, pola interaksi berpengaruh baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap kemampuan dan pemahaman dalam pelaksanaan pembahasan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di uraikan pada Bab V dan kesimpulan yang telah di paparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pola Relasi Eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD harus di berdasarkan panduan Undang-undang maupun Peraturan Menteri sebagai mekanisme pendukung untuk melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan Jadwal yang sudah di tentukan.
2. Pola interksi pada sebelum pengesahan APBD di Perdakan harus dilakukan kegiatan uji publik kepada masyarakat secara kolektif untuk mengetahui alokasi anggaran APBD tahun berikutnya, dan kegiatan tersebut dapat memberikan saran dan kritik yang konstruktif, melakukan diskusi/seminar dan melakukan forum khusus dengan pihak-pihak yang berpengaruh untuk dilakukan uji publik.

3. Pola hubungan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (Legislatif) yaitu sangat diperlukan kordinasi antara lembaga, peningkatan inovasi SKPD dan Badan Anggaran (Banggar) dalam melakukan penyusunan program kerja di masing-masing SKPD dan mampu meformulasikan segala usulan melalui forum Musrembang maupun masa reses yang di lakukan oleh legislatif.
4. Pola interaksi pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan formulasi anggaran harus dilaksanakan secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan dan melibatkan masyarakat dalam melakukan evaluasi pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Editor, Rajawali Press, Jakarta
- Astawa, I Gde Panca. 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Anthony, Robert dan Govindarjan Vijay. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Amal, Ichlasul dan Winarno, Budi 2007, *Metodologi Ilmu Politik*. Pusat studi Ilmu Sosial UGM.
- Alt, James., David Lassen & Shanna Rose. 2005. *The Causes of Fiscal Transparency: Evidence from the American States*. presented at the Jacques Polak Sixth Annual Research Conference, International Monetary Fund, November 3-4, 2005.
- Bogdan Robert C and Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research For Education: an. Introduction to Theory and Methods*. Boston: Alin and Bacon.
- Burhan, Peter, Karin Gilland, Wyn Gran dan Zig Layton-Henry. 2004. *Research Method in Politics*. England: Macmillan.
- Bryan A. Garner (Ed.) .1999. *Black's Law Dictionary*. West Group, St. Paul, Minn, p. .
- Basrowi dan Suwardi. 2008. "*Memahami Penelitian Kualitatif*" Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, 2010. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*, edisi ketiga, penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, BPFE: Yogyakarta
- B.N Marbun. 2005. *DPRD Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Charles Horton Cooley. 1930. *Sociological Theory and Social Research*. New York. Hnery Holt Company.
- Carr, Jered B. dan Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the organizational middle. *Public Administration Quarterly* (Spring): 109-138

- Easton, David 1985. *A System Analysis of Political Life*, New York : John Willey and Sons Inc, , A Framework.
- Elizabeth A. Martin and Jonathan Law (2006) *A Dictionary of Law, Sixth Edition*. Oxford University Press, New York, p. John M. Echols dan Hassan Shadily (1995) *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- Helmke, Gretchen dan Steven, Levitsky “*Informal Institution and Comparative Politic: A Research Agenda Working Paper#307.203*”.
- Huda, Ni'matul dan Nazriyah.R, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Halim, Abdul. 2012 *Akuntabilitas sektor Publik Akuntansi keuangan Daerah*, Edisi 3, Jakarta, penerbit salemba Empat.
- Halim. 2004. *Otonomi Daerah, Penganggaran Daerah, Dan Korupsi*, Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis ke-44 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Literatur.
- Haryadi, 2003, “Kedudukan dan Peranan Badan Legislatif Daerah” dalam Abdul Gafar Karim (editor), 2003. *Kompleksitas persoalan otonomi daerah di Indonesia* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hart, O., 1995 “*Corporate Governance: Some Theory and Implications*.”*The Economic Journal* 105(430): 678-689.
- Hadi, Sutrisno. 2001. “*Metodologi Research*”, Yogyakarta: Teras.
- Local Governance Support Program, 2007, *Legal Drafting Penyusunan Peraturan Daerah*, USAID, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Marbun, B.N. 1983. *DPR Daerah Masa Depan dan Pertumbuhannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi: Yogyakarta
- 2009 *Akuntansi sector Publik*, penerbit Andi, Yogyakarta

- 2009, *Pengawasan pengendalian dan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*, penerbit Andi Jogjakarta.
- Moleong, J.L, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, 2001, *Motede Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Monks, R. A. G. and Minow, N., 2004 ,*Corporate Governance*. Oxford, Blackwell Publishing.
- Michelman, Frank 2003 'Democracy and Positive Liberty'. In Campbell, Tom and Stone Adrienne (Ed.) *Law and Democracy*. Dartmouth Publishing Company Ashgate Publishing Limited, Burlington.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Percetakan Universitas Atma Jaya, Cetakan ke 1, Yogyakarta.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundangan-Undangan Indonesia*. md Hill co. Jakarta.
- Nazir, Moh, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Nace Magner, dan Gary G. Johnson. 1995. Municipal officials' reactions to justice in budgetary resource allocation. *Public Administration Quarterly* (Winter): 439-456.
- Kameyama, Takuji et.al. 2003. *Manual Review Regulasi Indonesia*. Proyek Peningkatan Deregulasi dan Kompetisi, Jakarta.
- Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Penyunting Khudzaifah Dimiyati, Muhammadiyah University Press.

- Robert Van Nel, 1984, Munculnya elit Modern Di Indonesia, Penerbit PT Dunia Pustaka jaya, Yogyakarta.
- John Gillin, Lewis, John Philip Gillin. 1954. *Cultural Sociology*. New York: The Macmillan Company
- Seidman, Ann, Seidman, Robert B. and Abeyserkeve, Nalin. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Terjemahan oleh Usfunan, Johanes et.al. Proyek ELIPS, Jakarta.
- Soemarjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakrta Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soejono 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soejono dan Sulistyowati, Budi 2014, *Sosialogi Suatu Pengantar*. Jakarta, Penerbit Rajawali Pers.
- Sitepu, P, Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sirajudin, dkk, 2008, *Legislative Drafting: pelebagaan Metode Partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, penerbit In-Trans Publishing Malang.
- Retnami, Setya 2000. *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Jakarta.
- Martokusumo, Sri Soemantri 1981. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutaryo dan Jakawinarna, 2013, *Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Dukungan Empiris dan Perspektif Teori Keagenan*, Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1984, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, edisi ke-3, Jakarta:CV. Rajawali
- Sanit, Arbi. 1985. *Partai Pemilu Dan Demokrasi*, Jakarta : Rajawali.

- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies *Europion Journal of Political Research* 37: 261-289.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sudjijono, Budi 2003. *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*, Citra Mandala Pratama, Jakarta.
- Setiabudi, Elly M dan Kolip, Usman 2011. *Pengantar Sosiologi "Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: teori dan Aplikasi, dan Pemecahannya"*. Jakarta. Penerbit Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Suryabrata, Sumardi 1983, *Metode Penelitian*. Jakarta, Penerbit Raja GrafindoPersada.
- Tim Penyusun, 2008, "*Kamus Bahasa Indonesia (KBI)*". (Jakarta: pusat bahasa pendidikan Indonesia Nasional.
- Kimbal Young, Raymond W. Mack. 1959. *Sociology and Social Life*. New York: American Company.
- Tatang, Amirin. 1998. "*Menyusun Rencana Penelitian*", Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Varma, SP, 2007, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wismar E, 2004, Yogyakarta, Analisis Peranan Badan Legislatif Daerah Dalam Pembentukan Perda(Studi di DPRD Kota Yogyakarta), Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Wayne Parson, 2005, *Public Policy*, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan, Jakarta: Prenada Media.

Jurnal dan Literatur

- Abdullah, S. 2012. Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari

Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia.
Ringkasan Disertasi. Universitas Gajah Mada.

Abdullah, S. dan Asmara, J.A. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang: 23-26 Agustus 2006.

Barani, Darwin. "Kajian Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah Model Ekowisata Di Kota Manado." *Lex Administratum* 3.4 (2015).

Florensia, T. M. 2009. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Ekonomi Universitas Gajah Mada*.

FIKRI, ALI. *Proses Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Kekuatan Politik DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Pembahasan Pelarangan Minuman Beralkohol (Arranging Process of the Regional Provision and Political Power Function of DPRD (Regional Legislative Assembly) of Indramayu Regency within Discussing the Alcoholic Liquor Prohibition)*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005.

- Hafid, Abd, Mahmud Tang, and Mungsi Lampe. "*Hubungan Anggota Legislatif Kota Makassar Dengan Masyarakat Pendukungnya.*"
- Jehamat, Lasarus. "Pola Relasi Sosial Elit Tradisional: Kasus Desa Rana Mbeling, Kabupaten Manggarai Timur, NTT." *Jurnal Demokrasi* 10.1 (2011).
- Megasari, Ida Ayu Gede Sutha. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.*"
- Kurniadi, putra. "perilaku politik elit politik lokal pada pemilukada kota tanjungpinang 2012."
- Ruslan, Achmad. 2005. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Kualitas Produknya Kajian atas Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Sulawesi Selatan*. Disertasi pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sintawati, 2008, *Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran Pada Penganggaran Partisipatif* (Studi kasus pada P.T Pupuk Kijang). Skripsi, bandung Universitas padjajaran.
- Singkoh, Frans C. "Peran elit politik dalam proses penetapan kebijakan publik di DPRD Kota Manado." *JURNAL EKSEKUTIF* 2.1 (2013).

Sulton, Sulton. "Siklus Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo Studi Kasus Dana Hibah dan Bantuan Sosial APBD 2013." *Jurnal ARISTO* 5 (2015).

Sukoco, Nanda Pratama. "Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur."

Riyanto, Agus. "Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010." *SPEKTRUM* 12.2 (2012).

Pariury, Gabrielle Issabelle O., and Priyo Hari Adi. "*Political Interest Legislatif Dalam Pengalokasian Anggaran Daerah Pada Sektor Pekerjaan Umum.*"

Watungadha, marianus. "pelaksanaan hak inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten ngada pada tahun 2009-2014." (2015): 1-26.

Undang-undang dan Peraturan-Peraturan

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2010 Tentang
APBD Kabupaten Buru Selatan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2011 Tentang
APBD Kabupaten Buru Selatan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 30 Tahun 2012 Tentang
APBD Kabupaten Buru Selatan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2013 Tentang
APBD Kabupaten Buru Selatan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2014 Tentang
APBD Kabupaten Buru Selatan

Dokumen-Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2015

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPAS) Tahun 2014

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran (PPAS) Tahun 2015

Risalah Sidang DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Buru Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Nota Keuangan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
Selatan Tahun 2014, Nomor 06.a/KPTS-DPRD/2014
tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi DPRD Buru Selatan

Daftar Kontrol Renstra, LKPJ 2015 dan Renja 2017 Kabupaten
Buru Selatan

Dokumen Jadwal Penyusunan APBD Buru Selatan Oleh Bappeda
dan Litbang Buru Selatan Tahun 2015

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Buru Selatan Tahun 2015

Profil Buru Selatan Tahun 2015 Penerbit Bappeda dan Litbang

Kata Akhir Fraksi PDI Perjuangan Tahun 2015

Kata Akhir Fraksi Partai Demokrat Tahun 2015

Kata Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional Tahun 2015

Kata Akhir Fraksi Partai Gerindra Tahun 2015

Kata Akhir Fraksi Perubahan Tahun 2015

Kata Akhir Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera Tahun 2015

Internet

www.kabartimur.co.id Di akses pada hari jumat 05/03/2015